



JURNAL AZ ZAHRA: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
(AZ ZAHRA JOURNAL: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS)

p-ISSN XXXX-XXXX | e-ISSN XXXX-XXXX
Home Page: <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra>

ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Gadis Ayu Apriasari¹, Lisa Efrina², Estele Elora Akbar³

^{1,2,3}Universitas Islam An Nur Lampung

Article History:

Received: Februari 10, 2023

Revised: Februari 20, 2023

Accepted: Maret 01, 2023

Published: Maret 8, 2023

Keywords:

Pemekaran, Pertumbuhan Ekonomi

*Correspondence Address:

gadisayuapriasari@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat dengan menganalisis pengaruh PD, JP, IPM serta bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan hasil uji beda paired t-test nilai signifikansi diperoleh $0.352 > 0.05$ maka menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. atau nilai signifikan ($0.042 < 0.05$). Pengujian menggunakan uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran dikarenakan tidak terjadi peningkatan PDRB. Islam memandang Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat belum optimal karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat masih belum diiringi dengan meningkatnya PDRB, penurunan kemiskinan dan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan

INTRODUCTION

Pemekaran wilayah, pemekaran berasal dari kata “MEKAR” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan mulai berkembang, mengurai, bangun dan menjadi banyak. Sedangkan Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Jadi pemekaran wilayah adalah suatu proses pembagian wilayah atau daerah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan (yayan Amroni, 2019)

Pemekaran wilayah juga erat kaitannya dengan pembangunan, dalam Islam pembangunan disebutkan sebagai

“keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya”. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan QS.Ad-Dhuha 93:4 yang artinya :“Dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)”

Pembangunan pada prinsipnya memiliki arti luas, secara sederhana pembangunan adalah perubahan kearah lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Dilaksanakannya proses pembangunan tidak lain karena ada perasaan tidak puas dari individu maupun masyarakat dari

keadaan yang dialami saat ini.(Tului, 2019)

Pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya dapat dicerminkan dari perubahan PDRB, pengeluaran daerah, jumlah penduduk, dan IPM disuatu daerah dalam periode tertentu. Tinginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Lepasnya Pesisir Barat dari pemerintahan induknya yang membentuk pemerintahan sendiri dan membentuk Kabupaten Pesisir Barat tentunya mengakibatkan terjadinya perubahan sumber-sumber daya dalam perekonomian wilayah, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat berakibat pada berkurangnya luas wilayah, termasuk potensi pendapatan, namun berdasarkan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Barat, kondisi perekonomian Tahun 2016.

Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertumbuhan ekonomi berada 5%, jika dilihat selama kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat cenderung mengalami naik turun setelah mengalami pemekaran.

Pemekaran wilayah telah terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah induk dan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah hasil pemekaran. Lepasnya Pesisir Barat

dari pemerintahan induknya yang membentuk pemerintahan sendiri dan membentuk Kabupaten Pesisir Barat tentunya mengakibatkan terjadinya perubahan sumber-sumber daya dalam perekonomian wilayah, perubahan jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat.

Pasca runtuhnya rezim Orde baru yang 32 tahun lamanya berkuasa menandai babak baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang semula pola hubungan pemerintah pusat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Wujud desentralistik dalam praktiknya yaitu pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam menjalankan urusan rumah tangga lokalnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Yusnani Hasyimzoem, 2016)

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong terbentuknya provinsi, kabupaten, dan kota sebagai suatu wilayah. Kondisi ini menciptakan perbedaan antara daerah provinsi, kabupaten, dan kota pemekaran, di mana ada daerah yang penduduk/kegiatan terkonsentrasi pada suatu tempat dan yang kurang terkonsentrasi.(Hamri et al., 2016).

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-quran dan Sunnah.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, IPM sebelum dan sesudah pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat.

c. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

THEORETICAL SUPPORT **Dasar Hukum Pertumbuhan Ekonomi**

Penduduk sebagai sumber daya yang menyediakan modal manusia dalam kegiatan perekonomian. Partisipasi aktif dari masyarakat akan mempercepat pembangunan suatu wilayah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap wilayah tersebut yang didukung oleh kinerja ekonomi yang lebih baik. (Hamid, 2016) Dalam hal ini Islam memandang pentingnya tolong-menolong sesama manusia, hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt, dalam Al-Quran surat Al-Maidah, Ayat 2 yang berbunyi :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

Selain itu juga, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah adalah pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang atau jasa, pengeluaran pemerintah adalah biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Sumber daya yang menyediakan modal manusia dalam kegiatan perekonomian. Partisipasi aktif dari masyarakat akan mempercepat pembangunan suatu wilayah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap wilayah tersebut yang didukung oleh kinerja ekonomi yang lebih baik. Dalam hal ini Islam memandang pentingnya tolong-menolong sesama manusia, hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt, dalam

Al-Quran surat Al-Maidah, Ayat 2 yang berbunyi :
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُلْحِقُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ : وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْاَلْحَدِيْ وَلَا الْاَقْلَنْدَ وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهَمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِيْمِ وَالْعَدْوٰى وَاَنْتُمْ اَللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝۲

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat beratsiksan-Nya".

Selain itu juga, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah adalah pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang atau jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah. Semakin banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah. Namun diharapkan kebijakan pemerintah dalam melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT seperti dijelaskan pada firman Allah SWT QS. Al-Maidah (49

Pengertian otonomi menurut UU No. 32 tahun 2004 dibedakan dengan pengertian desentralisasi. Karena pada pengertian otonomi Mengandung unsur "kewenangan untuk mengatur" atau

dengan kata lain terkandung juga pengertian kemandirian. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah hak dan wewenang.

Ramirez berpendapat bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang diukur dengan pembangunan manusia *human development* (sasana, 2016)

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengeluaran Daerah (PD), Jumlah Penduduk (JP), dan Indeks Pembangunan

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran daerah dapat dilihat dari pernyataan Mankiw yang dikutip dalam Riyad menyatakan bahwa Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari nilai PDRB yang merupakan nilai total pengeluaran setiap unit ekonomi dimana salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang dilakukan akan menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian yang akan memberi manfaat yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Avicenna S Hidayat, 2017)

Semakin banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah. Namun diharapkan kebijakan pemerintah dalam melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT seperti dijelaskan pada firman Allah SWT QS. A-Maidah yang Artinya : *“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka*

ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”

Ayat diatas menyerukan kepada pemimpin agar memutuskan suatu kebijakan hendaklah berdasarkan petunjuk Allah, karena dengan demikian masyarakat akan merasakan arti dari sebuah naungan dalam suatu kepemimpinan dalam Islam. Dengan adanya pemekaran tersebut, maka pemerintah dengan mudah untuk menangani masalah masyarakat terutama di bidang ekonomi. Oleh karena itu, pemekaran wilayah adalah cara dari pemerintah untuk mempersempit ruang lingkup guna untuk memudahkan pemerintah memantau kondisi perekonomian masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu alat pengukur prestasi dari Suatu perkembangan perekonomian. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu atau sudut pandang dalam memilih suatu opini.

Analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan perkapita, kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Papua dengan menggunakan analisis t-test equal mean (ida Ayu Purba et.al, 2016)

METHOD

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode

kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “field research”. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan gambaran tentang dampak pemekaranwilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat yang menuturkan pemecahan masalah sekarang berdasarkan data-data, juga menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikanya. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala- gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Zuriah, 2007) Dalam kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan apa adanya, tentang hal-hal yang berkenan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampug Barat

Pemekaran wilayah berimplikasi pada segala aspek kehidupan. Dampak-dampak pemekaran wilayah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dampak Sosio Kultural Dari dimensi sosial, politik dan kultural, bisa dikatakan bahwa pemekaran daerah mempunyai beberapa implikasi positif, seperti pengakuan sosial, politik ddan kultural terhadap masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, sebuah entitas masyarakat yang mempunyai sejarah

kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, dukungan daerah terhadap pemerintah nasional, serta manajemen konflik antar kelompok atau golongan dalam masyarakat (Aristika, n.d.).

Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisa atau kesimpulan. Sedangkan sumber data dalam penelitian subjek dari mana data tersebut diperoleh. Dengan kata lain data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung melainkan diperoleh melalui orang kedua yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan sesuai dengan permasalahan maka sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan data sekunder tentang hak-hak istri dalam perkawinan sirri. Dalam spesifikasi penelitian hukum (normatif).

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, penulis menggunakan data time series (runtut waktu) yang diperoleh dari instansi, dinas-dinas, juga penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian.

Data sekunder yang dikumpulkan adalah data yang tersedia di BPS Kabupaten Lampung Barat, yaitu data tentang pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh PDRB Kabupaten Lampung Barat dan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berupa data pengeluaran daerah, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan variabel dummy sebelum dan sesudah.

Data penelitian meliputi data sebelum pemekaran (2010-2012), sedangkan data setelah pemekaran digunakan data mulai tahun 2013-2016.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Adapun alasan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah data yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Lampung hanya tersedia diatas tahun 2010 dan dibawah tahun 2016.

RESULT AND DISCUSSION

Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Liwa. Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) di sebelah utara, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus di sebelah selatan, Kabupaten Pesisir Barat di sebelah barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan kabupaten Tanggamus di sebelah timur.

Berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat selama periode 2017 s/d 2022 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,57%, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun setelah dilakukannya pemisahan Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebesar minus 33,16%.

Pemekaran wilayah baru-baru ini terjadi di Provinsi Lampung yaitu di Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat dibagian ujung Barat dari Provinsi Lampung. Pembentukan Kabupaten Lampung Barat sudah dimulai sejak tahun 1997. Kabupaten Lampung Barat dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah induk dan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah hasil pemekaran. Kabupaten Pesisir Barat

merupakan sebuah Kabupaten termuda di Provinsi Lampung hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 231 Negara Republik Indonesia Nomor 5364) yang disahkan pada tanggal 25 Oktober dan Tambahan 2012.

Pertumbuhan ekonomi juga sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari pendapatan masyarakat yang diukur dengan nilai PDRB/kapita. Daerah yang lebih sejahtera umumnya memiliki PDRB/kapita yang lebih tinggi. PDRB/kapita dihitung dengan cara membagikan nilai PDRB daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Berdasarkan hasil uji beda didapatkan hasil nilai signifikansi.

Pemekaran wilayah merupakan implikasi dari penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana amanah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Implementasi pemekaran wilayah sebagai suatu bentuk percepatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat ternyata tidak selalu memberikan dampak positif tetapi tidak juga negatif terhadap perekonomian wilayah. Praktikno (2007) dalam Ratnawati (2009) mengatakan bahwa pemekaran wilayah memiliki “wajah ganda”, yaitu ada sisi positif dan sisi negatif. Manfaat dan kerugiannya sangat tergantung pada sudut pandang siapa, baik pemerintah daerah ataupun pusat. Jika dari sudut pandang daerah, pemekaran wilayah memberikan dampak positif bagi perkembangan percepatan pembangunan (Nugroho, 2011)

Setelah pemekaran Kabupaten Pesisir Barat atau 10,6% dari luas wilayah provinsi Lampung dan mempunyai Garis

pantai sepanjang 260 km, Kabupaten Lampung Barat memiliki Luas wilayah ± 3368,14 km². Kabupaten Lampung Barat terletak pada koordinat 40,47",16" – 50.56",42" lintang selatan dan 1030,35",08" 1040,33",51" Bujur Timur. Berdasarkan curah hujan dari Lembaga Meteorologi dan Geofisika, curah hujan Lampung Barat berkisar antara 2500-3000 milimeter setahun

Secara topografi, Kabupaten Lampung Barat memiliki tiga bentuk topografi lahan, yaitu: (1) Topografi Dataran Rendah memiliki ketinggian 0 – 600 meter dari permukaan laut; (2) Topografi Perbukitan mempunyai ketinggian 600 – 1000 meter dari permukaan laut. Daerah ini umumnya terdapat di kecamatan Balik Bukit dan Sumber Jaya; (3) Topografi Pegunungan mempunyai ketinggian 1000 – 2000 meter dari permukaan laut. Sebagian kecamatan Balik Bukit dan Sumber Jaya, serta sebagian besar wilayah Kecamatan Belalau terletak pada topografi daerah pegunungan ini.

Pengeluaran daerah Kabupaten Lampung Barat setelah mengalami pemekaran wilayah menurun drastis pada tahun dilakukannya pemekaran wilayah yaitu dari 4.907.703,07 (juta rupiah) menjadi 3.698.307,30 (juta rupiah). Kemudian meningkat kembalipada tahun 2013 dengan pengeluaran sebesar 3.845.234,99. Namun, untuk tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian di atas, maka dihasilkan kesimpulan bahwa sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji beda paired t-test nilai signifikansi $0.352 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah pemekaran wilayah.

2. Berdasarkan pengujian regresi secara parsial (Uji T) menunjukkan bahwa variabel pengeluaran daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat, variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat, dan variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan t-statistik dengan t-tabel yang dilakukan menggunakan SPSS.17 yaitu t-tabel sebesar 2.77645, sedangkan t-statistik variabel Pengeluaran Daerah = (1.432), Jumlah Penduduk = 0.028, dan IPM = (-0,974).

Berdasarkan Gambar tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat selama periode 2017 s/d 2022 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,57%, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun setelah dilakukannya pemisahan Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebesar minus 33,16%.

3. Ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat belum optimal karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat masih belum diiringi dengan meningkatnya penurunan kemiskinan dan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan sehingga dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat masih rendah. Sedangkan, Ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi yang optimal itu sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama, dan bangsa serta mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi yaitu kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi).

Konsep dari pembangunan manusia seutuhnya adalah konsep yang

menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental, maupun secara spiritual. Bahkan disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga manusia dapat dikatakan sebagai modal utama daya saing nasional.

Diketahui pencapaian IPM Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2017 s/d 2022 cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. UNDP menyatakan bahwa IP dikelompokkan menjadi empat klasifikasi, yaitu low (IPM < 50), lower-medium (50 – 65,99), upper-medium (IPM 66-79,99) dan high (IPM keatas). Berdasarkan data IPM Kabupaten Lampung Barat selama tahunv 2017 s/d 2023 dihasilkan rata-rata IPM sebesar 63,16 sehingga IPM Kabupaten Lampung Barat berada pada kategori IPM Lower-medium.

REFERENCES

- Aristika, A. (n.d.). *Comparative Study of Curriculum In Amt (Advanced Mathematical Thinking) Learning Models In Indonesia And Australia*. 148–151.
- Avicenna S Hidayat, F. W. N. (2017). Analisis pengaruh belanja pemerintah tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 15*.
- H, S. (2016). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomidi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi, 10*.
- Hamid, E. S. (2016). *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi*.
- Hamri, E., Intan, E., Putri, K., Siregar, H. J., Bratakusumah, D. S., No, J. I., Puunaaha, K., Unaaha, K., Konawe, K., & Belakang, A. L. (2016). (*Regional Autonomy Policy and mendorong kuatnya arus tuntutan daerah-daerah krisis moneter tahun 1998 mengubah Indonesia dari satu negara paling demokratis dan terdesentralisasi sebagai salah satu bentuk pengembangan wilayah sehingga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antarwilayah serta dapat menyeimbangkan pertumbuhan dan perkembangan antarwilayah hanya di wilayah provinsi , namun terjadi di wilayah wilayah secara administratif, yaitu wilayah kota ekonomi (pusat pertumbuhan) , sedang kabupaten Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia dengan strategi pemekaran wilayah merupakan fenomena pembentukan provinsi , kabupaten , dan kota , diharapkan mampu*. 111–125.
- ida Ayu Purba Riani dan M. Pudjihardjo. (2016). “Analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan perkapita, kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Papua (1 Februari 2012. *Jurnal Bumi Lestari, Vol. 12 No*.
- Nugroho, K. S. (2011). Pemekaran daerah, dapatkah menjadi model pemerataan pembangunan (Kasus pemekaran di Propinsi Banten). Best practices dalam penyelenggaraan otonomi daerah. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah, 1*.
- Tului, T. B. (2019). Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kabupaten Mahakam Ulu. *EJoournal Ilmu Pemerintahan, 7(3)*, 1183–1194.
- yayan Amroni. (2019). *ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*.

8(5), 55.

Yusnani Hasyimzoem, D. (2016). *Hukum Pemerintahan Daerah*. CV. Cita Intrans Laras Wisma Kalimetro.

Zuriah, N. (2007). *Metode Penelitian Sosial, dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Bumi Aksara.